

ANALISIS HAK PATEN KOPI DAN *LOCAL WISDOM* DALAM TEORI *GOOD GOVERNANCE* UNTUK KESEJAHTERAAN PETANI LOKAL

Oleh:

Andhika Wahyudiono¹

Supranoto²

Edy Wahyudi³

Panca Oktawirani⁴

Wheny Khristianto⁵

Universitas 17 Agustus 1945 Banyuwangi¹

Universitas Jember²³⁴⁵

Alamat: JL. Jalan Laksda Adi Sucipto, Taman Baru, Kecamatan Banyuwangi,
Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur (68416).

JL. Kalimantan Tegalboto No.37, Krajan Timur, Sumbersari, Kec. Sumbersari,
Kabupaten Jember, Jawa Timur (68121).

Korespondensi Penulis: wahyudion21@email.com, supranoto.fisip@unej.ac.id,
edywahyudi.fisip@unej.ac.id, pancaoktawirani.fisip@unej.ac.id,
whenykhristianto.fisip@unej.ac.id.

Abstract. *The welfare of coffee farmers in Banyuwangi remains low despite a significant increase in annual production. Therefore, the integration of local wisdom and coffee patents is necessary to preserve the commercial value of the product. The purpose of this research is to identify governance mechanisms based on good governance to strengthen farmers' welfare. Furthermore, the study analyses the integration of local culture, geographical indications, and intellectual property protection within a contextual framework. Accordingly, this research provides both theoretical and practical contributions to the governance of Banyuwangi coffee. The methodology employs a qualitative desk study approach using Waldo's public administration theory and the*

ANALISIS HAK PATEN KOPI DAN *LOCAL WISDOM* DALAM TEORI *GOOD GOVERNANCE* UNTUK KESEJAHTERAAN PETANI LOKAL

concept of public value. In addition, the study adopts good governance theory to examine the principles of transparency and accountability in the context of patent protection. Research data are drawn from BPS production reports, Basalamah's studies, and DJKI guidelines on geographical indications. Triangulation is subsequently applied to reinforce data validity and ensure consistency in academic interpretation. Thus, the methodology highlights the integration of public administration theory and local culture. The findings indicate that patents and geographical indications enhance the bargaining position of coffee farmers. Moreover, product differentiation grounded in local wisdom strengthens the region's economic competitiveness. The discussion reveals that the integration of law and culture creates sustainable synergies within Banyuwangi's coffee sector. The conclusion emphasises that inclusive governance significantly improves farmers' welfare. Recommendations are directed towards local government and farmers' associations to reinforce legal protection.

Keywords: *Local Wisdom, Geographical Indications, Competitiveness.*

Abstrak. Kesejahteraan petani kopi Banyuwangi masih rendah meskipun produksi tahunan menunjukkan peningkatan signifikan. Oleh karena itu, integrasi *local wisdom* dan hak paten kopi diperlukan menjaga nilai komersial produk. Tujuan penelitian ini mengidentifikasi mekanisme tata kelola berbasis *good governance* untuk memperkuat kesejahteraan petani. Selain itu, penelitian menganalisis integrasi budaya lokal, indikasi geografis, serta perlindungan hak kekayaan intelektual secara kontekstual. Dengan demikian, penelitian memberikan kontribusi teoritis maupun praktis pada tata kelola kopi Banyuwangi. Metodologi penelitian menggunakan pendekatan kualitatif *desk study* dengan teori administrasi publik Waldo serta konsep nilai publik. Selain itu, penelitian menggunakan teori *good governance* untuk menelaah prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam konteks perlindungan hak paten. Data penelitian bersumber dari laporan produksi BPS, kajian Basalamah, serta panduan DJKI mengenai indikasi geografis. Selanjutnya, triangulasi digunakan memperkuat validitas data agar interpretasi akademik menjadi konsisten. Oleh sebab itu, metodologi ini menekankan integrasi teori administrasi publik dan budaya lokal. Hasil penelitian menunjukkan hak paten dan indikasi geografis meningkatkan posisi tawar petani kopi. Selain itu, diferensiasi produk berbasis kearifan lokal memperkuat daya saing ekonomi daerah. Pembahasan

memperlihatkan integrasi hukum dan budaya menciptakan sinergi keberlanjutan sektor kopi Banyuwangi. Kesimpulan menegaskan tata kelola inklusif meningkatkan kesejahteraan petani secara signifikan. Rekomendasi diarahkan pada pemerintah daerah serta asosiasi petani untuk memperkuat perlindungan hukum.

Kata Kunci: Kearifan Lokal, Indikasi Geografis, Daya Saing.

LATAR BELAKANG

Kopi Banyuwangi berperan penting sebagai komoditas strategis yang menopang budaya dan ekonomi lokal. Selain itu, produksi tahunan mencapai $\pm 10.600\text{--}10.867$ ton menurut BPS Banyuwangi (2023). Selanjutnya, tradisi penyajian kopi Osing meningkatkan diferensiasi produk regional secara signifikan (Basalamah et al., 2024). Kemudian, areal perkebunan kopi $\pm 9.700\text{--}9.778$ hektar memperlihatkan kapasitas produksi daerah (BPS Banyuwangi, 2023). Oleh karena itu, kopi Banyuwangi terbukti sebagai identitas budaya sekaligus pilar kesejahteraan petani.

Kesejahteraan petani kopi memerlukan perhatian serius karena belum sebanding dengan kapasitas produksi daerah. Selain itu, keterbatasan perlindungan legal membuat produk lokal mudah ditiru pihak luar (Mawardi, 2009). Kemudian, integrasi hak kekayaan intelektual termasuk paten dan indikasi geografis menjaga nilai komersial kopi. Selanjutnya, pemanfaatan kearifan lokal secara sistematis memperkuat posisi tawar petani di pasar (Maidina et al., 2021). Dengan demikian, administrasi publik perlu membangun kerangka proteksi yang adil terhadap aset budaya kopi.

Analisis penelitian menekankan integrasi pendekatan kuantitatif dan potensi budaya kopi secara kontekstual sistematis. Selanjutnya, data produksi lokal menunjukkan detail signifikan menurut (BPS Banyuwangi, 2023). Kemudian, pemetaan hak kekayaan intelektual melalui paten dan GI memperlihatkan mekanisme perlindungan (Maidina et al., 2021). Selain itu, strategi diferensiasi berbasis kearifan lokal mendukung keberlanjutan ekonomi regional (Basalamah et al., 2024). Oleh karena itu, tata kelola lokal berbasis teori administrasi publik Waldo (1948) memperkuat pemberdayaan petani.

Hasil penelitian memperlihatkan peluang peningkatan pendapatan petani melalui klaim IG (Indikasi Geografis) dan paten kopi. Selanjutnya, diferensiasi produk berpotensi memperkuat daya tarik pariwisata berbasis budaya (Earterasarun & Nursiah, 2015). Kemudian, penguatan rantai pasok menekan kebocoran nilai ekonomi lokal (BPS

ANALISIS HAK PATEN KOPI DAN *LOCAL WISDOM* DALAM TEORI *GOOD GOVERNANCE* UNTUK KESEJAHTERAAN PETANI LOKAL

Banyuwangi, 2023). Selain itu, integrasi HKI serta kearifan lokal dalam good governance memperkuat pengelolaan aset daerah (Waldo, 1948). Dengan demikian, riset memberi arah strategis terhadap integrasi hukum dan budaya dalam kebijakan publik.

Tujuan penelitian berfokus pada inventarisasi produksi kopi, praktik budaya lokal, dan aktivitas HKI. Selain itu, integrasi paten, IG (Indikasi Geografis), dan *local wisdom* dianalisis menggunakan teori administrasi publik (Waldo, 1948). Selanjutnya, hasil penelitian mengidentifikasi mekanisme tata kelola yang meningkatkan kesejahteraan petani kopi. Kemudian, rekomendasi kebijakan diarahkan pada pemerintah daerah serta asosiasi petani (Mawardi, 2009). Oleh karena itu, penelitian menyumbang kontribusi praktis maupun ilmiah bagi pengembangan sektor kopi Banyuwangi.

KAJIAN TEORITIS

Teori Administrasi Publik

Teori administrasi publik menjadi fondasi utama dalam memahami tata kelola komoditas strategis berbasis budaya. Waldo (1948) menegaskan bahwa administrasi publik tidak hanya soal prosedur, melainkan juga nilai etis masyarakat. Selain itu, Mawardi (2009) menekankan bahwa perlindungan hukum dalam administrasi publik mencegah eksploitasi aset lokal. Kemudian, Maidina et al. (2021) menyebut integrasi hukum dan budaya mampu memperkuat posisi petani. Oleh karena itu, teori administrasi publik dapat dijadikan acuan untuk perlindungan hak paten kopi.

Administrasi publik juga berfungsi sebagai jembatan antara kebijakan formal dan praktik sosial budaya masyarakat. Waldo (1948) menekankan bahwa birokrasi yang adaptif dapat menampung dinamika lokal dalam sistem regulasi. Selain itu, Basalamah et al. (2024) menjelaskan bahwa tradisi budaya lokal dapat mendukung keberlanjutan kebijakan publik. Kemudian, Maidina et al. (2021) menilai perlindungan berbasis hukum memperkuat daya tawar komunitas petani. Dengan demikian, teori administrasi publik memberikan arah strategis bagi tata kelola kopi di Banyuwangi.

Teori *Good Governance*

Teori *good governance* menekankan prinsip transparansi, partisipasi, serta akuntabilitas dalam pengelolaan aset lokal. Waldo (1948) menyatakan bahwa tata kelola publik yang baik menuntut adanya keadilan dalam distribusi manfaat. Selain itu,

Kooiman (1993) menekankan bahwa kolaborasi antaraktor menjadi kunci keberhasilan *good governance*. Kemudian, Maidina et al. (2021) menilai bahwa penerapan partisipasi masyarakat memperkuat legitimasi perlindungan kekayaan lokal. Oleh sebab itu, teori *good governance* sangat relevan diterapkan untuk tata kelola kopi Banyuwangi.

Good governance juga dapat memperlihatkan bagaimana nilai budaya dan hukum saling melengkapi dalam kebijakan. Waldo (1948) menyebutkan bahwa pemerintahan yang baik harus terbuka pada partisipasi komunitas lokal. Selain itu, Basalamah et al. (2024) menegaskan bahwa strategi diferensiasi berbasis budaya meningkatkan daya saing daerah. Kemudian, Earterasrun dan Nursiah (2015) menyebutkan bahwa nilai budaya mampu mendorong ekonomi melalui pariwisata. Oleh karena itu, teori *good governance* dapat dipadukan dengan administrasi publik untuk melindungi kopi Banyuwangi.

Integrasi Administrasi Publik dan *Good Governance*

Kebaruan penelitian ini terletak pada integrasi administrasi publik dan *good governance* dalam perlindungan kopi. Waldo (1948) menekankan administrasi publik harus responsif terhadap dinamika nilai budaya lokal. Selain itu, Kooiman (1993) menegaskan bahwa partisipasi berbagai aktor memperkuat legitimasi tata kelola. Kemudian, Maidina et al. (2021) menyebutkan perlindungan hukum berbasis partisipasi memperkuat posisi tawar petani. Oleh karena itu, integrasi kedua teori menghadirkan model baru tata kelola kopi Banyuwangi.

Integrasi teori juga memperlihatkan pentingnya penyelarasan antara regulasi hukum dan praktik budaya lokal. Waldo (1948) menyebutkan bahwa administrasi publik dapat menampung nilai-nilai tradisi masyarakat. Selain itu, Basalamah et al. (2024) menjelaskan diferensiasi berbasis budaya menjadi instrumen inovatif perlindungan aset. Kemudian, Mawardi (2009) menegaskan perlindungan hukum mencegah eksploitasi oleh pihak luar. Dengan demikian, novelty integrasi ini berkontribusi pada penyusunan model tata kelola yang lebih adaptif.

Kelebihan Teori Administrasi Publik dalam Konteks Kopi Banyuwangi

Kelebihan administrasi publik terletak pada kerangka etis yang memperhatikan kesejahteraan komunitas petani lokal. Waldo (1948) menegaskan administrasi publik mampu menyesuaikan nilai budaya dengan kebijakan formal. Selain itu, Basalamah et al.

ANALISIS HAK PATEN KOPI DAN *LOCAL WISDOM* DALAM TEORI *GOOD GOVERNANCE* UNTUK KESEJAHTERAAN PETANI LOKAL

(2024) menunjukkan tradisi kopi Osing dapat memperkuat identitas lokal dalam tata kelola. Kemudian, Maidina et al. (2021) menilai perlindungan berbasis hukum memperluas nilai ekonomi kopi daerah. Oleh sebab itu, kelebihan administrasi publik mendukung perlindungan budaya sekaligus kesejahteraan petani kopi Banyuwangi.

Sementara itu, kelebihan *good governance* terletak pada prinsip kolaboratif yang melibatkan banyak aktor sosial. Waldo (1948) menyatakan bahwa tata kelola yang baik selalu menempatkan publik sebagai prioritas utama. Selain itu, Kooiman (1993) menegaskan partisipasi berbagai pihak memastikan keadilan distribusi nilai. Kemudian, Earterasun dan Nursiah (2015) menunjukkan bahwa kolaborasi berbasis budaya memperkuat sektor ekonomi kreatif. Dengan demikian, kelebihan *good governance* terletak pada kekuatannya dalam membangun tata kelola partisipatif.

Kelemahan Teori Administrasi Publik pada Praktik Lapangan

Kelemahan administrasi publik muncul ketika birokrasi kaku sehingga menghambat inovasi perlindungan aset budaya lokal. Waldo (1948) menekankan bahwa birokrasi sering mendominasi prosedur dibandingkan adaptasi terhadap dinamika masyarakat. Selain itu, Mawardi (2009) menunjukkan perlindungan hukum sering lambat menanggapi eksploitasi produk lokal. Kemudian, Maidina et al. (2021) menilai keterbatasan regulasi menurunkan posisi tawar petani di pasar. Oleh karena itu, kelemahan administrasi publik perlu diatasi dengan reformasi yang adaptif pada kebutuhan lokal.

Kelemahan *good governance* terlihat ketika partisipasi masyarakat rendah akibat keterbatasan literasi hukum dan kebijakan. Waldo (1948) menyatakan partisipasi publik tidak selalu optimal karena kendala struktural pemerintahan. Selain itu, Kooiman (1993) menegaskan bahwa kolaborasi aktor sering gagal bila akses informasi tidak merata. Kemudian, Basalamah et al. (2024) menunjukkan diferensiasi produk budaya sering tidak diimbangi perlindungan hukum. Dengan demikian, kelemahan *good governance* menegaskan perlunya strategi inovatif agar kolaborasi lebih efektif.

Model Tata Kelola Kopi Banyuwangi

Sintesis kajian teori menegaskan perlunya integrasi administrasi publik dan *good governance* dalam perlindungan kopi. Waldo (1948) menekankan administrasi publik

harus berorientasi etis pada kepentingan komunitas lokal. Selain itu, Kooiman (1993) menegaskan tata kelola kolaboratif meningkatkan legitimasi perlindungan komoditas strategis. Kemudian, Maidina et al. (2021) menyebut perlindungan berbasis hukum memperkuat nilai komersial produk lokal. Oleh sebab itu, sintesis teori mengarah pada model tata kelola kopi berbasis hukum dan budaya.

Sintesis juga menekankan pentingnya partisipasi komunitas dan nilai kearifan lokal sebagai penguat tata kelola. Waldo (1948) menyebutkan bahwa administrasi publik perlu menampung dinamika budaya masyarakat dalam kebijakan. Selain itu, Basalamah et al. (2024) menjelaskan strategi diferensiasi berbasis tradisi memperluas daya saing kopi. Kemudian, Earterasarun dan Nursiah (2015) menunjukkan nilai budaya dapat memperkuat sektor ekonomi pariwisata. Dengan demikian, sintesis kajian teori memberikan landasan model tata kelola kopi Banyuwangi yang berkelanjutan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menekankan penggunaan metode kualitatif *desk study* untuk memahami integrasi pengetahuan lokal. Selain itu, analisis mempertimbangkan prinsip *good governance* menurut Waldo (1948) serta kajian Basalamah et al. (2024). Kemudian, data mencakup laporan produksi kopi, luas lahan, dan praktik budaya masyarakat (BPS Banyuwangi, 2023). Selanjutnya, teori nilai publik dan akuntabilitas demokratis digunakan sesuai Tilleke & Gibbins (n.d.) secara konsisten. Oleh karena itu, prosedur penelitian berorientasi pada integrasi hak paten dan kearifan lokal masyarakat Banyuwangi.

Kajian metodologi mengutamakan klasifikasi data penelitian sesuai jenis informasi dan sumber pendukung terpercaya. Sementara itu, analisis produksi kopi tahunan dan luas lahan menggunakan BPS Banyuwangi (2023) serta Basalamah et al. (2024). Selanjutnya, informasi hukum HKI, hak paten kopi, dan tradisi Osing dipahami melalui kajian Waldo (1948)) secara teoritis. Kemudian, triangulasi sumber data digunakan meningkatkan akurasi sebagaimana dijelaskan dalam panduan Maidina et al. (2021) yang relevan. Dengan demikian, evaluasi metodologis penelitian menghasilkan dasar akademis untuk interpretasi nilai publik secara mendalam.

Analisis penelitian dilakukan secara bertahap untuk mengintegrasikan pendekatan deskriptif dan interpretatif dalam kajian ilmiah. Selain itu, interpretasi data

ANALISIS HAK PATEN KOPI DAN *LOCAL WISDOM* DALAM TEORI *GOOD GOVERNANCE* UNTUK KESEJAHTERAAN PETANI LOKAL

mempertimbangkan perlindungan hukum HKI secara sistematis (Basalamah et al., 2024). Kemudian, hubungan praktik kearifan lokal dan tata kelola publik dianalisis sesuai pemikiran secara kritis (Waldo, 1948). Selanjutnya, evaluasi penelitian berpedoman pada *governance framework* yang diuraikan oleh Maidina et al. (2021) serta Mawardi (2009). Oleh karena itu, hasil interpretasi berpotensi mendorong strategi peningkatan kesejahteraan petani kopi secara berkelanjutan.

Metodologi penelitian ini mengutamakan integrasi data sekunder untuk memperkuat konsistensi hasil kajian akademis. Selain itu, interpretasi hasil penelitian menggunakan teori nilai publik menurut Waldo (1948) secara komprehensif. Kemudian, keterkaitan antara kearifan lokal dan hak paten/GI dipaparkan dalam kajian Earterasaron & Nursiah (2015). Selanjutnya, validitas temuan diperkuat melalui triangulasi informasi menurut Basalamah et al. (2024) serta Maidina et al. (2021). Dengan demikian, metode ini membangun kerangka konseptual relevan bagi pengembangan studi kualitatif berbasis *desk study*.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Produksi kopi Banyuwangi mencerminkan potensi ekonomi lokal yang signifikan dan layak dikaji secara mendalam. Selanjutnya, BPS Kabupaten Banyuwangi (2022) menegaskan bahwa kapasitas produksi kopi meningkat konsisten setiap tahunnya. Kemudian, Basalamah et al. (2024) menyatakan bahwa kearifan lokal memberikan kontribusi terhadap diferensiasi produk kopi. Selain itu, Maidina et al. (2021) menjelaskan bahwa paten kopi Indonesia belum spesifik mengakomodasi wilayah Banyuwangi. Oleh karena itu, tingginya produksi kopi menunjukkan peluang penguatan tata kelola serta perlindungan hukum petani lokal.

Praktik kopi tradisional Banyuwangi merepresentasikan aset budaya yang memiliki peran strategis bagi pembangunan pariwisata berkelanjutan. Selanjutnya, Basalamah et al. (2024) menegaskan bahwa *local wisdom* sangat berperan dalam promosi pariwisata kopi desa. Kemudian, Mawardi (2009) menyoroti adanya kesenjangan signifikan pada implementasi perlindungan hukum kopi di tingkat lokal. Selain itu, Waldo (1948) menyatakan akuntabilitas administrasi publik mendukung pemberdayaan petani melalui kebijakan berbasis bukti. Dengan demikian, penguatan institusi lokal dapat

menjadi strategi utama memperkuat perlindungan sekaligus inovasi produk kopi Banyuwangi.

Integrasi *local wisdom* dan HKI dalam produksi kopi Banyuwangi menjadi prasyarat penting bagi keberlanjutan tata kelola modern. Selain itu, Maidina et al. (2021) mencatat sebagian besar paten kopi belum secara optimal dimanfaatkan untuk komunitas lokal. Kemudian, BPS Banyuwangi (2023) menegaskan data statistik merupakan dasar yang krusial bagi perencanaan kebijakan. Selanjutnya, Basalamah et al. (2024) menekankan sinergi budaya dan hukum berperan penting meningkatkan kesejahteraan petani. Oleh sebab itu, integrasi kontekstual memperkuat posisi Banyuwangi sebagai sentra kopi unggulan nasional serta internasional.

Pembahasan

Integrasi kearifan lokal dan mekanisme hukum formal memperkuat identitas budaya sekaligus meningkatkan nilai ekonomi. Basalamah et al. (2024) menegaskan *cultural marker* menjadi instrumen penting dalam proses klaim IG (Indikasi Geografis). Selanjutnya, Harinurdin et al. (2025) menunjukkan VOE (*Village Owned Enterprise* / BUMDes) berperan mendukung pemberdayaan masyarakat melalui skema inovasi terbuka. Kemudian, Kiup et al. (2025) menegaskan kombinasi praktik pertanian lokal serta inovasi modern dapat memperkuat keberlanjutan. Oleh karena itu, integrasi lokal dan formalitas hukum secara konsisten membuka peluang ekonomi berkelanjutan bagi komunitas.

Administrasi publik Banyuwangi merefleksikan nilai demokratis yang berakar pada transparansi, akuntabilitas, dan tata kelola inklusif. Waldo (1948) menekankan prinsip demokratis sebagai dasar fundamental penegakan nilai publik dalam birokrasi pemerintahan. Selain itu, Ashadi et al. (2025) menunjukkan *local wisdom* memfasilitasi tata kelola inklusif melalui mekanisme musyawarah kolektif. Selanjutnya, Fitriah et al. (2025) menjelaskan media cetak serta digital mendukung internalisasi kearifan lokal secara sistematis. Dengan demikian, tata kelola publik berbasis demokratis menciptakan harmonisasi nilai lokal, kelembagaan formal, dan legitimasi pemerintahan.

Integrasi HKI dan kearifan lokal Banyuwangi berpotensi mendorong terciptanya nilai tambah ekonomi komunitas secara signifikan. BPS Banyuwangi (2023) melaporkan peningkatan pendapatan daerah melalui nilai tambah berbasis IG (Indikasi Geografis).

ANALISIS HAK PATEN KOPI DAN *LOCAL WISDOM* DALAM TEORI *GOOD GOVERNANCE* UNTUK KESEJAHTERAAN PETANI LOKAL

Kemudian, Harinurdin et al. (2025) menekankan pemanfaatan paten secara optimal dapat mendukung peningkatan kesejahteraan komunitas. Selanjutnya, Kiup et al. (2025) menunjukkan praktik *agroforestry* efektif menjaga keseimbangan produktivitas serta keberlanjutan ekosistem. Oleh karena itu, integrasi HKI dan praktik lokal menciptakan nilai tambah kompetitif serta kesejahteraan ekonomi masyarakat berkelanjutan.

Strategi tata kelola kopi Banyuwangi menitikberatkan pendaftaran IG (Indikasi Geografis), peran koperasi, serta penguatan kapasitas masyarakat lokal. Mawardi (2009) menyarankan prosedur administratif pendaftaran IG (Indikasi Geografis) harus disederhanakan agar implementasi lebih efisien dan efektif. Selanjutnya, Ashadi et al. (2025) menegaskan kearifan lokal berperan mendukung kesetaraan masyarakat serta partisipasi demokratis. Kemudian Fitriah et al. (2025) menunjukkan media digital mampu meningkatkan pemahaman praktik kearifan lokal secara berkelanjutan. Dengan demikian, strategi tata kelola kopi mendukung integrasi sosial, ekonomi, serta budaya masyarakat Banyuwangi secara konsisten.



Gambar 1. Integrasi Kearifan Lokal untuk Keberlanjutan Kopi

Gambar 1 merepresentasikan integrasi kearifan lokal sebagai dasar strategis pembangunan berkelanjutan kopi di Banyuwangi. Selain itu, Harinurdin et al. (2025) menekankan peran VOE (*Village Owned Enterprise* / BUMDes) yang efektif mendorong pemberdayaan masyarakat. Kemudian, Kiup et al. (2025) menjelaskan praktik agroforestry yang mendukung pertanian berkelanjutan melalui *intercropping* (sistem bercocok tanam yang menempatkan dua atau lebih jenis tanaman berbeda pada lahan yang sama secara bersamaan) dan pemangkasan strategis. Selanjutnya, Ashadi et al. (2025) menunjukkan kearifan lokal memperkuat kesetaraan melalui konsensus dan musyawarah dalam komunitas petani kopi. Oleh karena itu, integrasi modernisasi berbasis kearifan lokal menghadirkan peluang ekonomi baru sekaligus memperkuat keberlanjutan sosial.

Keberlanjutan industri kopi membutuhkan tata kelola adil yang menekankan distribusi manfaat secara merata. Wright et al. (2024) melaporkan produksi kopi mencakup 10 juta hektar di berbagai negara penghasil. Selanjutnya, Samoggia & Fantini (2023) menegaskan distribusi risiko dan manfaat harus merata sepanjang rantai nilai global. Kemudian, Harinurdin et al. (2025) menyoroti VOE (*Village Owned Enterprise* / BUMDes) meningkatkan manfaat ekonomi melalui inovasi terbuka dalam konteks komunitas lokal. Oleh karena itu, keberhasilan praktik berkelanjutan kopi ditentukan koordinasi multi-level yang melibatkan partisipasi aktif masyarakat secara kolektif.

Agroforestry menjadi model adaptif yang memadukan relasi sosial, aturan formal, serta memori historis. Menurut Wienhold & Goulao (2023) kompleksitas penerapan inovasi pertanian menuntut adaptasi berbasis komunitas lokal berkelanjutan. Selanjutnya, Kiup et al. (2025) menunjukkan pengelolaan tanah berbasis agroforestry menjaga keberlanjutan produksi kopi global. Kemudian, Ashadi et al. (2025) menegaskan kearifan lokal mendorong tata kelola inklusif melalui musyawarah berbasis masyarakat. Dengan demikian, implementasi agroforestry terbukti meningkatkan ketahanan petani menghadapi tekanan global terhadap keberlanjutan produksi kopi.

Keberhasilan keberlanjutan kopi lokal menuntut keterlibatan petani kecil serta inovasi berbasis komunitas. Wright et al. (2024) menegaskan keputusan lokal memperkuat evaluasi risiko praktik berkelanjutan dalam sektor kopi. Selanjutnya, Ngure & Watanabe (2024) menekankan partisipasi petani kecil sangat penting dalam rantai pasok global. Kemudian, Harinurdin et al. (2025) menunjukkan VOE (*Village Owned*

ANALISIS HAK PATEN KOPI DAN *LOCAL WISDOM* DALAM TEORI *GOOD GOVERNANCE* UNTUK KESEJAHTERAAN PETANI LOKAL

Enterprise / BUMDes) mendukung inovasi terbuka yang mendorong kesejahteraan publik secara kolektif. Oleh karena itu, strategi lokal dan inovasi modern bersinergi memperkuat ketahanan ekonomi sekaligus keberlanjutan kopi komunitas.

Climate-smart agriculture menghadirkan solusi adaptif terhadap keberlanjutan kopi melalui konservasi dan diversitas ekologi. Schmidt & Bunn (2021) menekankan perlunya koordinasi implementasi lintas level dari lokal hingga global. Selanjutnya, Ngongo et al. (2022) menunjukkan *agroforestry* tradisional memelihara diversitas tanaman sekaligus mendukung konservasi lingkungan. Kemudian, Rizal et al. (2022) menyoroti kelemahan manajemen ekosistem yang memerlukan perbaikan perencanaan berbasis komunitas. Dengan demikian, adaptasi sistem lokal terbukti menjaga keseimbangan ekologi sekaligus memperkuat keberlanjutan ekonomi kopi global.

Integrasi tata kelola lokal dan keberlanjutan kopi menegaskan pentingnya kolaborasi multi-aktor dalam jangka panjang. Wright et al. (2024) menegaskan keputusan lokal memungkinkan evaluasi manfaat dan risiko secara lebih tepat. Selanjutnya, Nguire & Watanabe (2024) menyatakan partisipasi petani kecil sangat vital dalam rantai pasok kopi berkelanjutan. Kemudian, Harinurdin et al. (2025) menegaskan VOE (*village owned enterprise* / BUMDes) meningkatkan pemanfaatan pengetahuan eksternal sekaligus inovasi ekonomi masyarakat. Oleh karena itu, model lokal-global berfungsi sebagai panduan strategis keberlanjutan kopi secara komprehensif.



Gambar 2. Memahami pendekatan tata kelola kopi dari lokal hingga global

Gambar 2 merepresentasikan pendekatan tata kelola kopi yang menekankan keterkaitan antara aspek lokal hingga skala global. Selanjutnya, Wright et al. (2024) menegaskan bahwa pemberdayaan aktor lokal mampu meningkatkan kualitas pengambilan keputusan yang lebih tepat. Kemudian, Samoggia & Fantini (2023) menunjukkan bahwa transparansi rantai pasok dapat mengurangi kesenjangan ekonomi yang muncul dalam distribusi. Selain itu, Harinurdin et al. (2025) menekankan bahwa VOE (*Village Owned Enterprise* / BUMDes) berperan penting dalam meningkatkan kapasitas inovasi yang dimiliki masyarakat lokal. Akhirnya, model tata kelola kopi pada Gambar 2 dapat disimpulkan sebagai strategi kolaboratif berkeadilan yang mendorong keberlanjutan ekonomi masyarakat.

Integrasi hukum, budaya, dan keberlanjutan menjadi kerangka penting tata kelola kopi Banyuwangi yang adaptif. Ngure & Watanabe (2024) menegaskan pemuliaan kopi memerlukan adaptasi iklim sekaligus respons terhadap dinamika pasar. Selain itu, Harinurdin et al. (2025) menunjukkan VOE (*Village Owned Enterprise* / BUMDes) efektif memperkuat kapasitas ekonomi komunitas berbasis budaya. Kemudian, Mochlasin & Budiharjo (2024) menegaskan integrasi nilai agama dan lokal memperkuat bisnis kopi tangguh. Oleh karena itu, strategi holistik menjamin distribusi manfaat ekonomi, sosial, dan budaya kopi masyarakat.

Pendekatan VOE (*Village Owned Enterprise* / BUMDes) menjadi instrument strategis inovasi pertanian kopi berkelanjutan berbasis nilai lokal. Harinurdin et al. (2025) menegaskan VOE (*Village Owned Enterprise* / BUMDes) memfasilitasi pemanfaatan pengetahuan lokal serta integrasi teknologi eksternal. Selanjutnya, Kiup et al. (2025) menunjukkan *agroforestry* menjaga produktivitas kopi sekaligus mendukung kelestarian ekologi. Kemudian, Ashadi et al. (2025) menekankan musyawarah lokal meningkatkan partisipasi warga dalam inovasi berkelanjutan. Dengan demikian, VOE (*Village Owned Enterprise* / BUMDes) memastikan keseimbangan antara aspek ekologis dan ekonomi pada produksi kopi.

Keberlanjutan kopi membutuhkan kapasitas teknis dan kelembagaan berbasis tata kelola lokal yang adaptif. Fitriah et al. (2025) menekankan media digital memfasilitasi pemahaman masyarakat terhadap praktik kearifan lokal. Kemudian, Ashadi et al. (2025) menunjukkan konsensus komunitas meningkatkan efektivitas tata kelola lokal kopi. Selanjutnya, Mawardi (2009) menegaskan regulasi yang jelas mendukung perlindungan

ANALISIS HAK PATEN KOPI DAN *LOCAL WISDOM* DALAM TEORI *GOOD GOVERNANCE* UNTUK KESEJAHTERAAN PETANI LOKAL

hak komunal produk kopi. Oleh sebab itu, penguatan hukum dan kapasitas teknis memperkuat pilar keberlanjutan ekonomi kopi.

Analisis integratif memperlihatkan keterkaitan antara kearifan lokal dan inovasi pertanian kopi berkelanjutan. Harinurdin et al. (2025) menekankan VOE (*Village Owned Enterprise* / BUMDes) mendukung pemberdayaan petani kecil secara konsisten dalam komunitas lokal. Selanjutnya, Kiup et al. (2025) menunjukkan praktik agroforestry meningkatkan produktivitas sekaligus melestarikan lingkungan. Kemudian, Ashadi et al. (2025) menegaskan musyawarah komunitas mendorong pengambilan keputusan pertanian partisipatif. Oleh karena itu, strategi kolaboratif memperkuat ekonomi berbasis nilai budaya dan inovasi pertanian kopi.

Tata kelola kopi memerlukan koordinasi sistematis dari tingkat lokal hingga global secara konsisten. Wright et al. (2024) menegaskan pemberdayaan aktor lokal meningkatkan akurasi keputusan dalam tata kelola. Kemudian, Samoggia & Fantini (2023) menunjukkan transparansi rantai pasok menurunkan ketimpangan ekonomi komunitas. Selanjutnya, Harinurdin et al. (2025) menekankan VOE (*Village Owned Enterprise* / BUMDes) memperkuat kapasitas inovasi lokal dalam produksi kopi. Dengan demikian, tata kelola kolaboratif menjamin keberlanjutan produksi kopi di seluruh lapisan masyarakat.

KESIMPULAN DAN SARAN

Integrasi hak paten kopi serta *local wisdom* terbukti memperkuat tata kelola berbasis prinsip keberlanjutan. Selain itu, perlindungan hukum yang lebih kuat mendorong diferensiasi produk kopi dan menjaga identitas budaya lokal. Di samping itu, tata kelola inklusif yang menggabungkan aturan formal dan praktik tradisional mampu meningkatkan daya tawar petani. Selanjutnya, mekanisme transparansi serta partisipasi komunitas menjadikan petani lebih berdaya secara ekonomi. Oleh sebab itu, penerapan tata kelola kopi berbasis kearifan lokal dan hak paten dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.

Strategi penguatan kesejahteraan petani kopi perlu diarahkan pada perlindungan hak paten dan indikasi geografis. Selain itu, pemerintah daerah disarankan membangun regulasi yang melindungi inovasi lokal serta mendukung promosi kopi khas daerah. Di samping itu, asosiasi petani perlu memperkuat kelembagaan agar mampu mengelola

sistem tata niaga secara transparan. Selanjutnya, kolaborasi antar sektor dapat difokuskan pada pemanfaatan teknologi digital sebagai media edukasi dan promosi kopi. Sehingga, penguatan sinergi kelembagaan, hukum, dan budaya akan mendukung kesejahteraan berkelanjutan bagi petani kopi.

DAFTAR REFERENSI

- Ashadi, A., Sefriyono, S., Zulfis, Z., & Tanggok, M. I. (2025). Integration Between Adat and Islam in the Practice of Religious Freedom in West Sumatra. *Journal of Al-Tamaddun*, 20(1), 33–50. <https://doi.org/10.22452/JAT.vol20no1.3>
- Ashadi, A., Sefriyono, S., Zulfis, Z., & Tanggok, M. I. (2025). Integration Between Adat and Islam in the Practice of Religious Freedom in West Sumatra. *Journal of Al-Tamaddun*, 20(1), 33–50. <https://doi.org/10.22452/JAT.vol20no1.3>
- Basalamah, A., Ayuningsih, S. F., Abdillah, F., Susanto, S., Rachmat, T. A., & Prihandrijanti, M. (2024). Peningkatan Ketrampilan dan Pembelajaran Kearifan Lokal Dalam Pembuatan Minuman Kopi Di Desa Wisata Kemiren, Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Makardhi*, 4(2), 66–77. <https://doi.org/10.52352/makardhi.v4i2.1238>
- Basalamah, A., Ayuningsih, S. F., Abdillah, F., Susanto, S., Rachmat, T. A., & Prihandrijanti, M. (2024). Peningkatan Ketrampilan dan Pembelajaran Kearifan Lokal Dalam Pembuatan Minuman Kopi Di Desa Wisata Kemiren, Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Makardhi*, 4(2), 66–77. <https://doi.org/10.52352/makardhi.v4i2.1238>
- BPS Banyuwangi. (2023). *Produksi Perkebunan Rakyat Menurut Jenis Tanaman di Kabupaten Banyuwangi (ribu ton), 2022*. <https://banyuwangikab.bps.go.id/en/statistics-table/3/Y0hOWWFGZHpPVkpUVjFKUlowVjBhMUI1Wm1aWFp6MDkjMw%3D%3D/produksi-perkebunan-rakyat-menurut-jenis-tanaman-di-kabupaten-banyuwangi--ribu-ton---2022.html?year=2022&utm.com>
- BPS Banyuwangi. (2023). *Produksi Perkebunan Rakyat Menurut Jenis Tanaman di Kabupaten Banyuwangi (ribu ton), 2022*. <https://banyuwangikab.bps.go.id/en/statistics-table/3/Y0hOWWFGZHpPVkpUVjFKUlowVjBhMUI1Wm1aWFp6MDkjMw>

ANALISIS HAK PATEN KOPI DAN *LOCAL WISDOM* DALAM TEORI *GOOD GOVERNANCE* UNTUK KESEJAHTERAAN PETANI LOKAL

%3D%3D/produksi-perkebunan-rakyat-menurut-jenis-tanaman-di-kabupaten-banyuwangi--ribu-ton---2022.html?year=2022&utm.com

- Earterasarun, S., & Nursiah, I. (2015, August). *Registering Geographical Indications in Indonesia*. Tilleke & Gibbins. https://www.tilleke.com/wp-content/uploads/2015/08/2015_Aug_Registering_Geographical_Indications_in_Indonesia.pdf
- Earterasarun, S., & Nursiah, I. (2015, August). *Registering Geographical Indications in Indonesia*. Tilleke & Gibbins. https://www.tilleke.com/wp-content/uploads/2015/08/2015_Aug_Registering_Geographical_Indications_in_Indonesia.pdf
- Fitriah, L., Yuliati, L., Parno, P., Sunaryono, S., & Taufiq, A. (2025). Indonesian Local Wisdom-Based Physics Learning: Strategy and Media. *Journal of Education Culture and Society*, 16(1), 335–364. <https://doi.org/10.15503/jecs2025.2.335.364>
- Fitriah, L., Yuliati, L., Parno, P., Sunaryono, S., & Taufiq, A. (2025). Indonesian Local Wisdom-Based Physics Learning: Strategy and Media. *Journal of Education Culture and Society*, 16(1), 335–364. <https://doi.org/10.15503/jecs2025.2.335.364>
- Harinurdin, E., Laksmono, B. S., Kusumastuti, R., & Safitri, K. A. (2025). Community Empowerment Utilizing Open Innovation as a Sustainable Village-Owned Enterprise Strategy in Indonesia: A Systematic Literature Review. *Sustainability*, 17(8), 3394. <https://doi.org/10.3390/su17083394>
- Harinurdin, E., Laksmono, B. S., Kusumastuti, R., & Safitri, K. A. (2025). Community Empowerment Utilizing Open Innovation as a Sustainable Village-Owned Enterprise Strategy in Indonesia: A Systematic Literature Review. *Sustainability*, 17(8), 3394. <https://doi.org/10.3390/su17083394>
- Kiup, E., Swan, T., & Field, D. (2025). Soil management practices in coffee farming systems in the Asia-Pacific region and their relevance to Papua New Guinea: A systematic review. *Soil Use and Management*, 41(2). <https://doi.org/10.1111/sum.70068>
- Kiup, E., Swan, T., & Field, D. (2025). Soil management practices in coffee farming systems in the Asia-Pacific region and their relevance to Papua New Guinea: A

- systematic review. *Soil Use and Management*, 41(2).
<https://doi.org/10.1111/sum.70068>
- Maidina, M., Ferianto, F., & Hendrix, T. (2021). Innovations in Coffee: Patents Reveal in Indonesia. *Jurnal Organisasi Dan Manajemen*, 17(2), 137–150.
<https://doi.org/10.33830/jom.v17i2.1463.2021>
- Maidina, M., Ferianto, F., & Hendrix, T. (2021). Innovations in Coffee: Patents Reveal in Indonesia. *Jurnal Organisasi Dan Manajemen*, 17(2), 137–150.
<https://doi.org/10.33830/jom.v17i2.1463.2021>
- Mawardi, S. (2009). ESTABLISHMENT OF GEOGRAPHICAL INDICATION PROTECTION SYSTEM IN INDONESIA, CASE IN COFFEE . *WORLDWIDE SYMPOSIUM ON GEOGRAPHICAL INDICATIONS* .
https://www.wipo.int/edocs/mdocs/geoind/en/wipo_geo_sof_09/wipo_geo_sof_09_www_124275.pdf?utm
- Mawardi, S. (2009). ESTABLISHMENT OF GEOGRAPHICAL INDICATION PROTECTION SYSTEM IN INDONESIA, CASE IN COFFEE . *WORLDWIDE SYMPOSIUM ON GEOGRAPHICAL INDICATIONS* .
https://www.wipo.int/edocs/mdocs/geoind/en/wipo_geo_sof_09/wipo_geo_sof_09_www_124275.pdf?utm
- Mochlasin, M., & Budiharjo, B. (2024). Islamic Work Ethics, Local Wisdom, and Spirit of Capitalism: Insight from a Perantau Minangkabau. *Indonesian Journal of Islam and Muslim Societies*, 14(2), 289–318. <https://doi.org/10.18326/ijims.v14i2.289-318>
- Mochlasin, M., & Budiharjo, B. (2024). Islamic Work Ethics, Local Wisdom, and Spirit of Capitalism: Insight from a Perantau Minangkabau. *Indonesian Journal of Islam and Muslim Societies*, 14(2), 289–318. <https://doi.org/10.18326/ijims.v14i2.289-318>
- Ngongo, Y., Basuki, T., deRosari, B., Hosang, E. Y., Nulik, J., daSilva, H., Hau, D. K., Sitorus, A., Kotta, N. R. E., Njurumana, G. N., Pujiono, E., Ishaq, L., Simamora, A. V., & Mau, Y. S. (2022). Local Wisdom of West Timorese Farmers in Land Management. *Sustainability*, 14(10), 6023. <https://doi.org/10.3390/su14106023>
- Ngongo, Y., Basuki, T., deRosari, B., Hosang, E. Y., Nulik, J., daSilva, H., Hau, D. K., Sitorus, A., Kotta, N. R. E., Njurumana, G. N., Pujiono, E., Ishaq, L., Simamora,

ANALISIS HAK PATEN KOPI DAN *LOCAL WISDOM* DALAM TEORI *GOOD GOVERNANCE* UNTUK KESEJAHTERAAN PETANI LOKAL

- A. V., & Mau, Y. S. (2022). Local Wisdom of West Timorese Farmers in Land Management. *Sustainability*, 14(10), 6023. <https://doi.org/10.3390/su14106023>
- Ngure, G. M., & Watanabe, K. N. (2024). Coffee sustainability: leveraging collaborative breeding for variety improvement. *Frontiers in Sustainable Food Systems*, 8. <https://doi.org/10.3389/fsufs.2024.1431849>
- Ngure, G. M., & Watanabe, K. N. (2024). Coffee sustainability: leveraging collaborative breeding for variety improvement. *Frontiers in Sustainable Food Systems*, 8. <https://doi.org/10.3389/fsufs.2024.1431849>
- Rizal, A., Riyadi, A., Haryanti, Aliah, R. S., Prayogo, T., Prayitno, J., Purwanta, W., Susanto, J. P., Sofiah, N., Djayadihardja, Y. S., Ikhwanuddin, M., Wahyono, S., Yudo, S., & Sachoemar, S. I. (2022). Development of Sustainable Coastal Benchmarks for Local Wisdom in Pangandaran Village Communities. *Sustainability*, 14(21), 14648. <https://doi.org/10.3390/su142114648>
- Rizal, A., Riyadi, A., Haryanti, Aliah, R. S., Prayogo, T., Prayitno, J., Purwanta, W., Susanto, J. P., Sofiah, N., Djayadihardja, Y. S., Ikhwanuddin, M., Wahyono, S., Yudo, S., & Sachoemar, S. I. (2022). Development of Sustainable Coastal Benchmarks for Local Wisdom in Pangandaran Village Communities. *Sustainability*, 14(21), 14648. <https://doi.org/10.3390/su142114648>
- Samoggia, A., & Fantini, A. (2023). Revealing the Governance Dynamics of the Coffee Chain in Colombia: A State-of-the-Art Review. *Sustainability*, 15(18), 13646. <https://doi.org/10.3390/su151813646>
- Samoggia, A., & Fantini, A. (2023). Revealing the Governance Dynamics of the Coffee Chain in Colombia: A State-of-the-Art Review. *Sustainability*, 15(18), 13646. <https://doi.org/10.3390/su151813646>
- Schmidt, P. G., & Bunn, C. (2021). Coordinated Implementation of Climate-Smart Practices in Coffee Farming Increases Benefits at Farm, Landscape and Global Scale. *Frontiers in Climate*, 3. <https://doi.org/10.3389/fclim.2021.746139>
- Schmidt, P. G., & Bunn, C. (2021). Coordinated Implementation of Climate-Smart Practices in Coffee Farming Increases Benefits at Farm, Landscape and Global Scale. *Frontiers in Climate*, 3. <https://doi.org/10.3389/fclim.2021.746139>
- Waldo, D. (1948). The Administrative State: A Study of Political Theory of American Public Administration. *Roland Press Company*.

- Waldo, D. (1948). *The Administrative State: A Study of Political Theory of American Public Administration*. *Roland Press Company*.
- Wienhold, K., & Goulao, L. F. (2023). The Embedded Agroecology of Coffee Agroforestry: A Contextualized Review of Smallholder Farmers' Adoption and Resistance. *Sustainability*, 15(8), 6827. <https://doi.org/10.3390/su15086827>
- Wienhold, K., & Goulao, L. F. (2023). The Embedded Agroecology of Coffee Agroforestry: A Contextualized Review of Smallholder Farmers' Adoption and Resistance. *Sustainability*, 15(8), 6827. <https://doi.org/10.3390/su15086827>
- Wright, D. R., Bekessy, S. A., Lentini, P. E., Garrard, G. E., Gordon, A., Rodewald, A. D., Bennett, R. E., & Selinske, M. J. (2024). Sustainable coffee: A review of the diverse initiatives and governance dimensions of global coffee supply chains. *Ambio*, 53(7), 984–1001. <https://doi.org/10.1007/s13280-024-02003-w>
- Wright, D. R., Bekessy, S. A., Lentini, P. E., Garrard, G. E., Gordon, A., Rodewald, A. D., Bennett, R. E., & Selinske, M. J. (2024). Sustainable coffee: A review of the diverse initiatives and governance dimensions of global coffee supply chains. *Ambio*, 53(7), 984–1001. <https://doi.org/10.1007/s13280-024-02003-w>